



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

**RENCANA STRATEGIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
TAHUN 2010 - 2014**



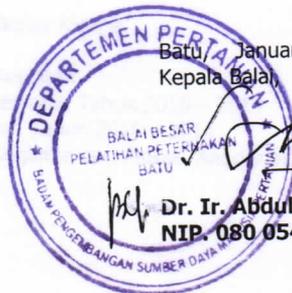
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
Jl. Songgoriti No. 24 PO BOX. 17 Telp. [0341] 591302 Fax [0341] 597032
JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh visi dan misi yang mendasari serta rencana dan strategik (Renstra) yang dimilikinya, dalam kerangka manajemen, hal tersebut seringkali harus dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk dokumen tertulis sehingga dapat dibaca, dimengerti, dan diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang terkait dengan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu melalui berbagai kajian dan bahasan telah berhasil merumuskan Renstra organisasinya yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Departemen Pertanian, serta tindak lanjut program kerja Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian 2010 - 2014. Rencana dan strategi ini disusun berdasarkan tinjauan teoritis dan kondisi lapangan (empiris) dari masalah yang melingkupi pembangunan SDM Pertanian melalui pelatihan di bidang peternakan baik bagi aparatur maupun non aparatur dan masyarakat luas. Renstra ini diharapkan merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya, ini tercermin dari program dan kegiatan yang akan dilakukan khususnya hingga tahun 2014.

Dengan selesainya penyusunan Renstra BBPP Batu tahun 2010 – 2014 diharapkan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan SDM Pertanian khususnya di bidang pelatihan peternakan dapat memanfaatkan sebagai bahan acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, serta adanya *feed back* untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyusunan **Renstra BBPP Batu**.



Batu, Januari 2010

Kepala Balai,

Dr. Ir. Abdul Samad Melleng, MM
NIP. 080 054 870

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kondisi Umum SDM BBPP Batu	2
	C. Potensi	2
	D. Hasil yang Dicapai	3
	E. Permasalahan	4
	F. Peluang dan Tantangan	6
BAB II	VISI DAN MISI	7
	A. Visi	7
	B. Misi	7
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	8
	A. Tujuan	8
	B. Sasaran	8
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
	A. Strategi	10
	B. Kebijakan	10
BAB V	ORGANISASI	11
	A. Tugas Pokok	11
	B. Fungsi	11
	C. Susunan Organisasi	12
	D. Tata Kerja Struktur Organisasi BBPP Batu	14
BAB VI	PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	16
	A. Program	16
	B. Kegiatan dan Indikator Kinerja	16
	C. Indikator Kinerja	17
	1. Program Aksi/Kegiatan	17
	2. Program dan Kegiatan Tahun 2010 – 2014	20
	3. Alokasi Anggaran Tahun 2010 – 2014	22
	4. Program Aksi/Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2010 – 2014	23
BAB VI	PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor pertanian di masa mendatang terus memegang peranan yang strategi dalam pembangunan nasional, karena kontribusinya yang nyata terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, PDB, sumber devisa negara, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mendukung peran strategi pertanian, Departemen Pertanian sedang menggalakkan program kecukupan kebutuhan protein hewani melalui program swasembada daging. Program ini dicanangkan mengingat konsumsi daging sapi untuk kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui impor ternak bakalan dari daging beku (Ditjennak, 2009). Pada sisi lain, kecukupan protein hewani melalui konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tergolong rendah yaitu sebesar 10 liter/kapita/tahun dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura 23,7 liter, Thailand 29,9 liter dan Malaysia 30,1 liter (Tetra Park Indonesia, 2009, Kompas 7 Oktober 2009).

Dalam upaya untuk mencapai sasaran dan memenuhi ketertinggalan pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, maka diperlukan peningkatan sumberdaya manusia pertanian – peternakan yang berkualitas. Pengembangan kualitas SDM yang profesional, inovatif, mandiri dan berwawasan global akan mendukung kemandirian pangan, nilai tambah dan peningkatan ekspor dan kesejahteraan petani. SDM ini dapat dibangun salah satunya dengan peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/OT.140/2/2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelatihan peternakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Departemen Pertanian. Tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Perwujudan sumber daya manusia peternakan yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global melalui Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sangat dibutuhkan

terutama dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan pelatihan di bidang peternakan. Oleh karena itu perlu disusun rencana Strategi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2010 – 2014 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Perencanaan Strategi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan proses perencanaan kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2010 – 2014 yang menggambarkan perencanaan terukur, sistematis dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara langsung dapat berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Strategi ini merupakan pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu untuk menjabarkan kegiatan operasionalnya.

B. Kondisi Umum SDM BBPP Batu

Kondisi SDM Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan jumlah aparatur sebanyak 87 orang pegawai yang terdiri dari: Laki-laki sebanyak 65 orang dan Wanita sebanyak 22 orang.
2. Berdasarkan tingkatan umur, terdiri dari : 32 orang berumur dibawah 40 tahun, 38 orang berumur antara 40 – 50 tahun; dan 17 orang berumur diatas 50 tahun.
3. Berdasarkan latar belakang pendidikan formal, terdiri dari : S3: 3 orang, S2: 12 orang, S1: 18 orang, D3: 6 orang, SLTA: 30 orang, SD: 18 orang.
4. Berdasarkan jabatan, terdiri dari : Pejabat Fungsional 17 orang, Pejabat Struktural 11 orang, Tenaga Teknis 10 dan Fungsional Umum 49 orang.

C. Potensi

1. Aspek Kelembagaan Pelatihan
 - a. Eselon II, Kepala Balai
 - b. Eselon III, terdiri dari :
 - Kepala Bagian Umum
 - Kepala Bidang Program dan Evaluasi
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
 - c. Eselon IV, terdiri dari:
 - Berada di bawah Kepala Bagian Umum :
 - a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - b. Kepala Subbagian Keuangan

- c. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Instalasi
 - Berada di bawah Kepala Bidang Program dan Evaluasi
 - a. Kepala Seksi Program dan Kerjasama
 - b. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Berada di bawah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
 - a. Kepala Seksi Pelatihan Aparatur
 - b. Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur

2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Kapasitas
a.	Ruang Kelas dan Instalasi	: 3 ruangan dan 13 unit
b.	Asrama	: 5 Unit (kapasitas 135 org)
c.	Aula	: 1 Unit (kapasitas 400 org)
d.	Ruang Makan	: 3 Ruang
e.	Sarana Olah raga	: 5 Unit
f.	Lapangan Parkir	: Kapasitas 50 unit roda 4/2
g.	Sarana Ibadah	: Masjid
h.	Perpustakaan	: 1 Unit
i.	Koperasi/Toko	: 1 Unit

3. Aspek Ketenagaan

- a. Jumlah tenaga fungsional widyaiswara 17 Orang
- b. Jumlah Tenaga fungsional umum 49 orang;
- c. Tenaga Teknis 10 orang;
- d. Tenaga struktural 11 orang

D. Hasil yang dicapai

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Penambahan Sarana Diklat meliputi Sapi Potong, Kambing Perah/Potong, Domba, Ayam, Itik, Puyuh, kelinci.
 - b. Menumbuhkembangkan Kelembagaan P4S sebanyak 56 P4S
 - c. Menumbuhkembangkan Kelembagaan bagi LM3 sebanyak 20 LM3

2. Aspek Ketenagaan
 - a. Peningkatan tenaga teknis menjadi widyaiswara sebanyak 5 orang
 - b. Pengusulan Pengangkatan menjadi CPNS 3 orang Honorer
 - c. Peningkatan kualitas SDM Balai melalui :
 - Pelatihan Teknis di Luar Negeri bagi Widyaiswara sebanyak 6 orang
 - Pelatihan Teknis dan manajemen, SAI (SAK & SIMAK BMN) sebanyak 4 orang, SIMONEV sebanyak 3 orang, SIMPEG sebanyak 3 orang, Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 7 orang.
3. Aspek Penyelenggaraan
 - a. Terakreditasinya 2 jenis program pelatihan;
 - b. Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur dan non aparatur 3.506 orang;
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 2.275 orang aparatur,
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 1.231 orang non aparatur.
 - c. Penyiapan SDM pelatihan dalam rangka Program PUAP :
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 284 orang Penyuluh Pendamping,
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 568 orang pengelola GAPOKTAN,
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 62 orang Penyelia Mitra Tani.
 - d. Penyiapan SDM dalam rangka Program LM3 :
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 496 orang Pendamping,
 - Terselenggaranya pelatihan bagi 520 orang Pengelola.
4. Aspek Kerjasama
 - a. Kerjasama dalam negeri: dengan PTPN X Surabaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan Instansi Pemerintah/Lembaga yang lain.
 - b. Kerjasama Luar Negeri dengan : Sudan, Afganistan dan negara-negara ASEAN

E. Permasalahan

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Belum seluruh program pelatihan teknis peternakan terakreditasi oleh LAN;
 - b. Belum seluruh kelembagaan pelatihan swadaya (P4S) terakreditasi di wilayah binaan;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) dalam rangka mendukung program pelatihan berbasis kompetensi;

- d. Belum meratanya penyebaran dan kualitas P4S di wilayah binaan;
- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelatihan.
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung keahlian widyaiswara.
- g. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Pertanian.

2. Aspek Ketenagaan

- a. Spesialisasi kompetensi widyaiswara bidang teknis peternakan belum mengacu pada pengembangan sistem agribisnis,
- b. Terbatasnya pelatihan untuk kompetensi widyaiswara dan fungsional lainnya dalam mengemban tugas secara profesional,
- c. Terbatasnya latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kediklatan dalam mendukung tupoksi,
- d. Terbatasnya tenaga yang memahami tentang pengadaan barang/jasa, penatausahaan BMN, pengelolaan administrasi keuangan,
- e. Penempatan tenaga kepelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian.

3. Aspek Penyelenggaraan

- a. Belum semua unit kerja BBPP Batu menyusun dan menerapkan SOP,
- b. Belum semua proses penyelenggaraan pelatihan sesuai SOP,
- c. Belum tersusunnya SKKNI untuk komoditas peternakan,
- d. Kurangnya sosialisasi keberadaan P4S pada pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan pengembangan P4S,
- e. Kurangnya jenis dan jumlah pelatihan teknis bagi penyuluh dan petugas peternakan,
- f. Kurangnya jenis dan jumlah pelatihan bagi fungsional lainnya.

4. Aspek Kerjasama

- a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan bagi aparatur dan non aparatur dengan lembaga pemerintah/swasta,
- b. Belum optimalnya kerjasama untuk pemanfaatan fasilitas sarana prasarana balai (Inkubator Agribisnis) dalam rangka persiapan menjadi mandiri,

- c. Belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemanfaatan sarana,
 - d. Belum terbangunnya sistem kerjasama pelatihan yang berkelanjutan.
5. Aspek Administrasi Pelatihan
- a. Belum lengkapnya Juklak/Juknis pelatihan yang disusun,
 - b. Terbatasnya acuan penatausahaan barang milik Negara,
 - c. Belum optimalnya pemahaman sertifikasi tentang pengadaan barang/jasa,
 - d. Belum tersedianya perangkat peraturan yang berkaitan dengan penilaian angka kredit bagi widyaiswara dalam penyelenggaraan pelatihan non aparatur,
 - e. Belum tersusunnya pedoman jenjang pelatihan teknis fungsional peternakan,
 - f. Belum adanya legalitas tingkat Menteri Pertanian tentang penyelenggaraan pelatihan teknis lingkup Departemen Pertanian.

F. Peluang dan Tantangan

1. Era pasar bebas menuntut produk peternakan memiliki daya saing tinggi
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap inovasi dan penerapan teknologi tepat guna agribisnis peternakan
3. Meningkatnya tuntutan pemerintah akan SDM Peternakan yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui swasembada daging 2014
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan yang prima
5. Tumbuhkembangnya lembaga pelatihan swasta yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelatihan.

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi

"Menjadi lembaga pelatihan yang inovatif, terpercaya dan mandiri untuk menghasilkan SDM bidang peternakan yang profesional"

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan serangkaian misi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja
2. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis.
3. Melaksanakan pengembangan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja (SKK).
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan dalam memberikan pelayanan konsultasi agribisnis yang prima.
5. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan pelatihan kerjasama luar negeri.
6. Melaksanakan sistem informasi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penatausahaan, keuangan dan rumah tangga balai yang transparan dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategi adalah :

1. Menyusun rancang bangun dan program pelatinnan balai
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan berdasarkan standar nasional dan internasional
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional widyaiswara dan tenaga pelatihan berdasarkan standar profesi
4. Menyelenggarakan diklat sesuai standar nasional dan internasional
5. Menyelenggarakan kerjasama dan jejaring kerja pelatihan peternakan
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian internal penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan
7. Melaksanakan administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan SDM Pertanian di bidang Peternakan adalah :

1. Tersedianya Master Plan berupa Mini Maket Balai 1 paket;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan berdasarkan standar nasional dan internasional :
 - a. Terakreditasinya program pelatihan bagi aparatur melalui LAN sebanyak 5 jenis pelatihan;
 - b. Terstandarisasinya lembaga pelatihan swadaya sebanyak 56 P4S;
 - c. Berkembangnya kegiatan PIA sebanyak 5 paket;
 - d. Berkembangnya sistem administrasi dan Manajemen Balai (SAI (SAK & SIMAK BMN) SOP, SPI, Web Site, SIMPEG) sebanyak 5 paket;
 - e. Muktahii nya data base balai sebanyak 5 paket;
 - f. Meningkatnya kapasitas Balai untuk menyelenggrakan pelatihan bertaraf internasional dan sesuai dengan standar ISO sebanyak 5 kali.
3. Meningkatnya kapasitas tenaga fungsional widyaiswara dan tenaga pelatihan berdasarkan standar profesi:

- a. Meningkatnya kompetensi, spesialisasi, dan profesi widyaiswara 85 orang, tenaga teknis dan fungsional lainnya sebanyak 50 orang dan tenaga struktural sebanyak 55 orang;
 - b. Bertambahnya jumlah tenaga fungsional, teknis, dan administrasi sebanyak 25 orang;
 - c. Tersertifikasinya keahlian widyaiswara sebanyak 17 orang.
4. Terselenggaranya diklat sesuai standar nasional dan internasional yang menghasilkan SDM peternakan yang inovatif dan professional :
- a. Terlatihnya aparatur sebanyak 880 orang, non aparatur 1.890 dan pelatihan swadaya sebanyak 1.680 orang;
 - b. Terlaksananya perencanaan program pelatihan sebanyak 5 kali;
 - c. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan sebanyak 5 paket;
 - d. Tersedianya standar kualitas penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan teknis agribisnis, sebanyak 5 jenis paket;
 - e. Tersedianya sarana prasarana diklat sebanyak 5 paket;
 - f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sebanyak 10 kali.
5. Terselenggaranya kerjasama dan jejaring kerja pelatihan peternakan
- a. Kerjasama kediklatan luar negeri 10 kali;
 - b. Kerjasamanya kediklatan dalam negeri 20 kali.
6. Terlaksananya pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian internal penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan :
- a. Terlaksananya monev dan pelaporan pelatihan sebanyak 10 kali;
 - b. Terlaksananya SPI 5 paket.
7. Terlaksananya administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel :
- a. Terlaksananya administrasi dan manajemen kelembagaan yang transparan dan akuntabel sebanyak 3 sub keg.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan teknis bagi aparatur dan non aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung program unggulan eselon I teknis,
2. Pelatihan teknis dan permagangan bagi pengelola lembaga pelatihan swadaya dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan di UPT Pelatihan,
3. Pelatihan bagi petani sebagai pelaku utama agribisnis dilaksanakan oleh lembaga pelatihan swadaya,
4. Pelaksanaan administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

B. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Rencana Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan peternakan :
 - a. Pemantapan kelembagaan pelatihan;
 - b. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian;
 - c. Peningkatan mutu penyelenggaraan;
 - d. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan.
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
 - a. Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan;
 - b. Standarisasi, akreditasi dan fasilitasi lembaga pelatihan.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan
 - a. Fasilitasi melalui APBN;
 - b. Fasilitasi melalui kerjasama.
4. Pelaksanaan administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel
 - a. Peningkatan administrasi dan manajemen kelembagaan.

BAB V

ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/OT.140/2/2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yaitu perubahan organisasi dan tata kerja BBDAPHTH menjadi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yang selanjutnya disebut BBPP Batu adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan peternakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Departemen Pertanian.

Tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

B. Fungsi

- a. Penyusunan rencana program, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur pertanian;
- e. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dibidang peternakan bagi non aparatur pertanian;
- f. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak;
- g. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- h. Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang peternakan;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis;

- k. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- l. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka uraian tugas dari masing-masing Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai Besar

Kepala Balai besar mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP Batu yang meliputi urusan kepegawaian dan rumah tangga, urusan keuangan, perlengkapan dan instalasi;
- b. Pengelolaan dalam hal urusan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pemberian pelayanan, pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- d. Memberikan bimbingan dan arahan serta pengendalian dan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan atau melalui koordinator masing-masing pejabat fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan, penyusunan SKK, paket pembelajaran, dan media pelatihan serta pemberian konsultasi agribisnis maupun kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP Batu, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan perlengkapan dan instalasi.

3. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kerjasama;
- c. pengelolaan data dan informasi pelatihan;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan, pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur pertanian;
- b. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi non aparatur pertanian.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara dan instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur adalah:

- a. Melakukan pelatihan teknis dan kewirausahaan dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur pertanian;
- c. Menyusun bahan Standart Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
- d. Menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
- e. Melakukan pengembangan teknik pelatihan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak;

- f. Melakukan pengembangan teknik pelatihan peternakan bagi aparaturnya dan non aparaturnya;
- g. Melakukan pemberian konsultasi agribisnis;
- h. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tata Kerja Struktur Organisasi BBPP Batu

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP batu wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP Batu bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib mengadakan rapat berkala. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP Batu wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1. Eselonisasi BBPP Batu

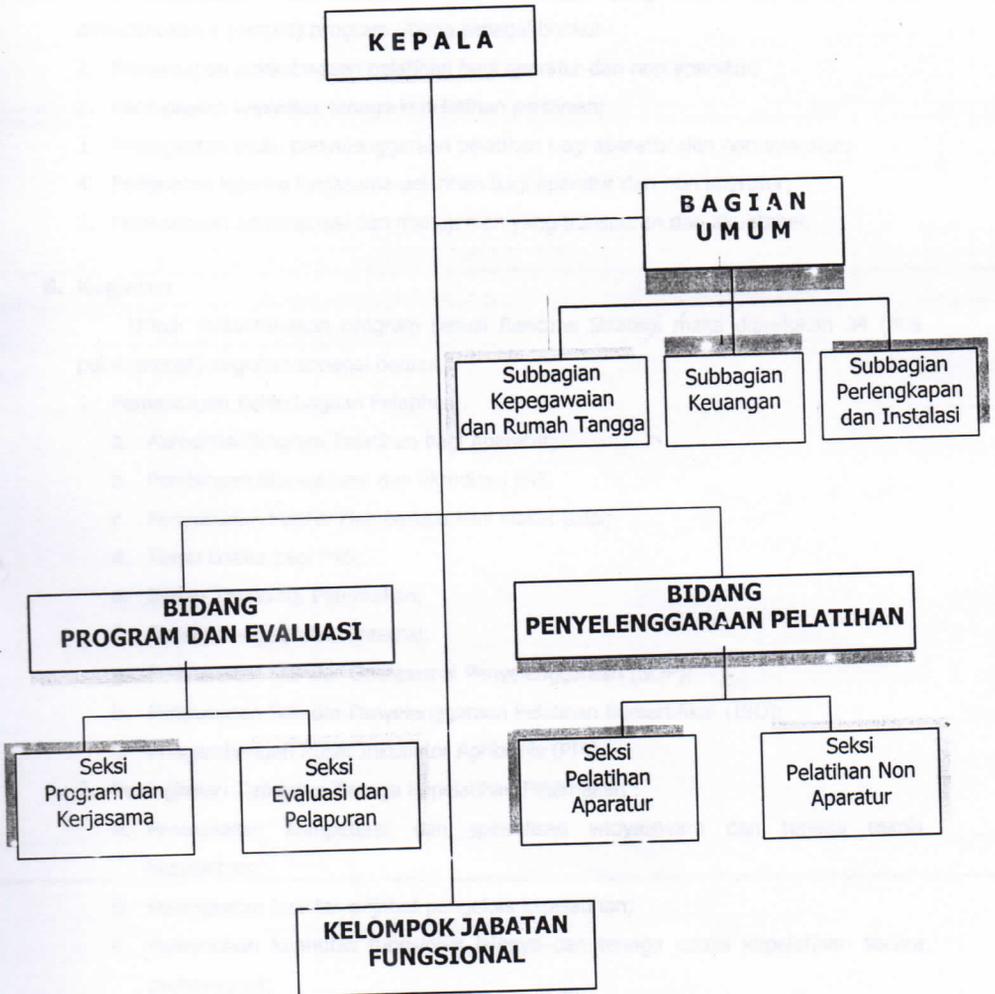
Kepala Balai adalah jabatan struktural Eselon II-b

Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III-b

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV-b.

2. Bagan Struktur Organisasi BBPP Batu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2/2007 tertanggal 19 Februari 2009 maka dapat dilihat Bagan struktur organisasi BBPP Batu pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

BAB VI**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA****A. Program**

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategis yang telah ditetapkan maka direncanakan 4 (empat) program utama sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian;
3. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur;
4. Penguatan jejaring kerjasama pelatihan bagi aparatur dan non aparatur;
5. Pelaksanaan administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

B. Kegiatan

Untuk melaksanakan program sesuai Rencana Strategi maka diperlukan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan :
 - a. Akreditasi Program Pelatihan bagi Aparatur;
 - b. Pembinaan Standarisasi dan akreditasi P4S;
 - c. Penyusunan Master Plan berupa Mini Maket Balai;
 - d. Temu Usaha bagi P4S;
 - e. Bedah Teknologi Peternakan;
 - f. Sistem Pengendalian Internal;
 - g. Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan (SOP);
 - h. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat (ISO);
 - i. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA).
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Peternakan :
 - a. Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara dan tenaga teknis kepelatihan;
 - b. Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepelatihan;
 - c. Pemenuhan kuantitas fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan secara proporsional;
 - d. Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan swadaya.
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan

- a. Penyusunan perencanaan program;
 - b. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
 - c. Simonev/Lakip dan Evaluasi Pelatihan;
 - d. Evaluasi Pasca Pelatihan;
 - e. Pengembangan materi, metodologi dan multimedia pelatihan;
 - f. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;
 - g. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur;
 - h. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bagi non aparatur;
 - i. Penyelenggaraan Pelatihan swadana.
4. Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Peternakan
 - a. Menjalin kerjasama pelatihan teknis dalam negeri;
 - b. Menjalin kerjasama pemanfaatan sarana pelatihan.
 5. Pelaksanaan Administrasi dan Manajemen yang transparan dan akuntabel
 - a. Peningkatan administrasi dan manajemen kelembagaan.

C. Indikator Kinerja

NO	PROGRAM AKSI/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
1	2	3	4
1.	Pemantapan Kelembagaan Pelatihan		Pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelatihan
	a. Akreditasi Program Pelatihan bagi aparatur,	Terakreditasinya program pelatihan bagi aparatur,	
	b. Pembinaan Standarisasi dan Akreditasi P4S,	Terakreditasinya bagi 56 P4S,	
	c. Penyusunan Master Plan berupa Mini Maket Balai,	Tersedianya dokumen master plan 1 paket,	
	d. Temu Usaha bagi P4S,	Terlaksananya Temu Usaha bagi P4S 5 kali,	
	e. Bedah Teknologi Peternakan,	Terselenggaranya Bedah Teknologi 5 kali,	
	f. Sistem Pengendalian Internal,	Terselenggaranya SPI sebanyak 10 kali,	
	g. Penyusunan Standar Operasional (SOP),	Tersusunnya SOP pelatihan 5 paket,	
	h. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat (ISO)	Tersusunnya standar penyelenggaraan pelatihan	

		bersertifikat (ISO), Berkembangnya PIA.	
	i. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)		
2.	<p>Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepeleatihan</p> <p>a. Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepeleatihan,</p> <p>b. Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepeleatihan,</p> <p>c. Penemuan Kuantitas fungsional lainnya dan tenaga teknis kepeleatihan secara proporsional,</p> <p>d. Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan swadaya.</p>	<p>Meningkatnya kompetensi bagi 17 WI dan 15 fungsional dan tenaga teknis lainnya dan adanya spesialisasi bagi 17 WI</p> <p>Adanya peningkatan kualitas pejabat pengelola kepeleatihan,</p> <p>Adanya penambahan widyaiswara sebanyak 10 orang dan tenaga teknis kepeleatihan sebanyak 4 orang,</p> <p>Terjadinya pengembangan kapasitas bagi 56 lembaga pelatihan swadaya.</p>	Kinerja tenaga kepeleatihan meningkat
3.	<p>Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan</p> <p>a. Penyusunan perencanaan program,</p> <p>b. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan,</p> <p>c. Simonev/Lakip dan Evaluasi Pelatihan;</p> <p>d. Evaluasi Pasca Pelatihan;</p> <p>e. Pengembangan materi, metodologi dan multimedia pelatihan;</p> <p>f. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;</p> <p>g. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur;</p>	<p>Tersusunnya program pelatihan,</p> <p>Terlaksananya IKP 5 kali,</p> <p>Terselenggaranya Simonev/Lakip dan Evaluasi 5 paket</p> <p>Terlaksananya evaluasi pasca pelatihan 5 kali</p> <p>Terlaksananya pengembangan materi, metodologi dan multimedia pelatihan,</p> <p>Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelatihan,</p> <p>Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur sebanyak 880 orang.</p>	Penyelenggaraan pelatihan lebih bermutu

	<p>h. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bagi non aparatur;</p> <p>i. Penyelenggaraan Pelatihan swadana.</p>	<p>Terseleenggaranya pelatihan bagi aparatur sebanyak 1.890 orang,</p> <p>Terseleenggaranya pelatihan swadana sebanyak 15 angkatan @ 20 orang,</p>	
4.	<p>Penguatan Jejaring Kerjasama</p> <p>a. Meningkatkan pelatihan kerjasama dalam negeri</p> <p>b. Meningkatkan pelatihan kerjasama luar negeri</p>	<p>Terlaksananya pelatihan kerjasama dalam negeri sebanyak 20 kali</p> <p>Terlaksananya pelatihan kerjasama luar negeri sebanyak 10 kali</p>	<p>Jejaring kerjasama pelatihan semakin kuat</p>
5.	<p>Pelaksanaan Administrasi dan Manajemen yang transparan dan akuntabel</p> <p>a. Meningkatkan administrasi dan manajemen kelembagaan</p>	<p>Terlaksananya administrasi dan manajemen kelembagaan sebanyak 3 sub kegiatan</p>	<p>Adminstrasi dan manajemen kelembagaan yang transparan dan akuntabel</p>

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 – 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemantapan Kelembagaan Pelatihan	a. Akreditasi Program Pelatihan bagi aparatur, b. Pembinaan Standarisasi dan Akreditasi P4S, c. Penyusunan Master Plan berupa Mini Maket Balai, d. Temu Usaha bagi P4S, e. Bedah Teknologi Peternakan, f. Sistem Pengendalian Internal, g. Penyusunan Standar Operasional (SOP), h. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat (ISO) i. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	1 paket				
			11	11	11	11	12
			1 unit	-	-	-	-
			1 kali				
			1 kali				
			1 paket				
			1 paket				
			1 paket				
			1 paket				
2.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelembagaan Pelatihan	a. Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan, b. Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepelatihan, c. Pemenuhan Kuantitas fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan secara proporsional, d. Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan swadaya.	7 org	7 org	8 org	8 org	7 org
			-	2 org	2 org	2 org	2 org
			3 org				
			1 P4S				
3.	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan	a. Penyusunan perencanaan program, b. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, c. Simonev/Lakip dan Evaluasi Pelatihan; d. Evaluasi Pasca Pelatihan; e. Pengembangan materi, metodologi dan multimedia pelatihan; f. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan; g. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur; h. Penyelenggaraan pelatihan	1 paket				
			1 keg				
			17 keg	19 keg	21 keg	23 keg	26 keg
			1 keg				
			-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			3 paket				
			4 angk	5 angk	6 angk	7 angk	8 angk
			11	12	13	14	16

		dan p...magangan bagi non aparaturn; i. Penyelenggaraan Pelatihan swak...ana.	angk 5 angk	angk 8 angk	angk 15 angk	angk 18 angk	angk 22 angk
4.	Penguatan Jejaring Kerjasama	a. Meningkatkan pelatihan kerjasama dalam negeri b. Meningkatkan pelatihan kerjasama luar negeri	20 kali 10 kali	22 kali 12 kali	24 kali 14 kali	26 kali 16 kali	28 kali 18 kali
5.	Pelaksanaan Administrasi dan Manajemen yang transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan adminstrasi dan manajemen kelembagaan	3 sub keg				

ALOKASI ANGGARAN 2010 – 2014

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp .000)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan	457.400	503.140	553.454	608.799	669.681
2. Peningkatan kapasitas Tenaga Kepelatihan	145.400	159.940	175.934	193.527	212.880
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan	3.459.765	3.830.741	4.186.316	4.604.947	5.065.442
4. Penguatan Jejaring kerjasama pelatihan bagi dalam dan luar negeri	118.307	130.138	143.151	157.467	173.213
5. Penerapan (Administrasi) Pemerintahan yang Baik	5.181.036	5.699.140	6.269.054	6.895.959	7.585.555
JUMLAH	9.361.908	10.298.099	11.327.099	12.460.700	13.706.770

PROGRAM AKSI/KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN 2010 – 2014

NO	PROGRAM AKSI/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp .000)/TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemantapan Kelembagaan Pelatihan	457.400	503.140	553.454	608.801	669.681
	a. Akreditasi Program Pelatihan bagi aparatur,	22.150	24.365	26.802	29.482	32.430
	b. Pembinaan Standarisasi dan Akreditasi P4S,	48.450	53.295	58.625	64.487	70.936
	c. Penyusunan Master Plan berupa Mini Maket Balai,	33.820	37.202	40.922	45.014	49.516
	d. Temu Usaha bagi P4S,	90.280	99.308	109.239	120.163	132.179
	e. Bedah Teknologi Peternakan,	154.800	170.280	187.308	206.039	226.643
	f. Sistem Pengendalian Internal (SPI),	18.000	19.800	21.780	23.958	26.354
	g. Penyusunan Standar Operasional (SOP),	19.300	21.230	23.353	25.688	28.257
	h. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat (ISO)	19.300	21.230	23.353	25.688	28.257
	i. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	51.300	56.430	62.073	68.280	75.108
2.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelembagaan	145.400	159.940	175.934	193.527	212.880
	a. Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan,	50.200	55.220	60.742	66.816	73.498
	b. Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepelatihan,	68.000	74.800	82.280	90.508	99.559
	c. Pemenuhan Kuantitas fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan secara proporsional,	27.200	29.920	32.912	36.203	39.823
	d. Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan swadaya.	-	-	-	-	-

3.	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan	3.459.765	3.830.741	4.186.316	4.604.947	5.065.442
	a. Penyusunan perencanaan program,	175.123	192.635	211.899	233.089	256.398
	b. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan,	47.650	52.415	57.657	63.422	69.764
	c. Simonev/Lakip dan Evaluasi Pelatihan;	46.200	50.820	55.902	61.492	67.641
	d. Evaluasi Pasca Pelatihan;	33.650	37.015	40.717	44.789	49.268
	e. Pengembangan materi, metodologi dan multimedia pelatihan;	-	25.000	27.500	30.250	33.275
	f. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;	1.196.750	1.316.425	1.448.068	1.592.875	1.752.163
	g. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur;	562.623	618.885	680.774	748.851	827.336
	h. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bagi non aparatur.	1.115.769	1.227.346	1.350.081	1.485.089	1.633.598
	i. Penyelenggaraan Pelatihan swadana (non APBN)	282.000	310.200	341.220	375.342	412.867
4.	Penguatan Jejaring Kerjasama	118.307	130.138	143.151	157.467	173.213
	a. Meningkatkan pelatihan kerjasama dalam negeri	118.307	130.138	143.152	157.467	173.214
	b. Meningkatkan pelatihan kerjasama luar negeri	-	-	-	-	-
5.	Penerapan (Administrasi) Pemerintahan yang Baik	5.181.036	5.699.140	6.269.054	6.895.959	7.585.555
	JUMLAH (APBN)	9.079.908	9.987.899	10.986.689	12.085.358	13.293.894
	JUMLAH (TANPA APBN)	282.000	310.200	341.220	375.342	412.876
	TOTAL	9.361.908	10.298.099	11.327.909	12.460.700	13.706.770

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu 2010 – 2014 ini, disusun berdasarkan analisis lingkungan strategi, tuntutan perubahan yang ada serta kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi berupa : aspek anggaran, aspek sarana prasarana, aspek kesiapan sumberdaya manusia serta perubahan *mindset* pelaksana Renstra.

Rencana Strategis ini akan berhasil, apabila dalam pelaksana kegiatan tahunan mengacu dan berpedoman pada Renstra serta kemungkinan-kemungkinan resiko yang ditiadakan atau diminimalisir. Rencana Strategis yang telah disusun dan telah disepakati bersama ini, setiap tahun akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Kemudian pada akhir tahun pencapaian kinerja akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu 2010 – 2014 ini harus dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dan *stake holder* terkait secara menyeluruh, sehingga seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan visi dan misi, peran serta anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta tingkat keberhasilan program dan kegiatan diukur berdasarkan indikator kinerja. Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu diharapkan dapat berkesinambungan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain sehingga mendapatkan output yang bermanfaat dalam memajukan kualitas SDM Pertanian serta dapat terlaksana, terkoordinir dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya Tujuan Strategis.